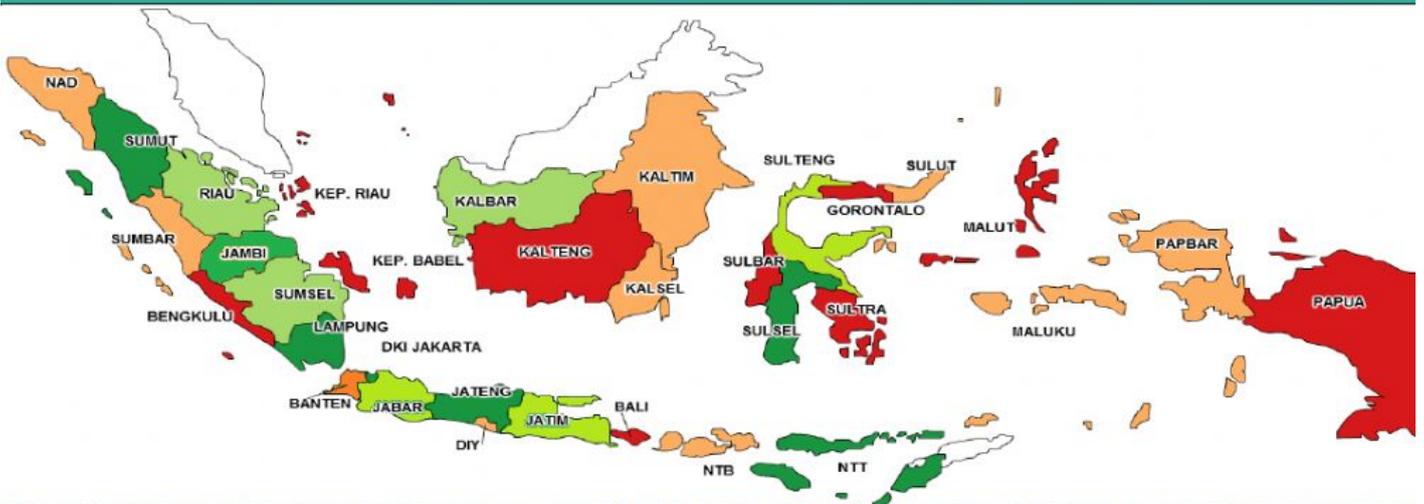


# LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK DIGITAL



## SEJARAH INDONESIA

### PERISTIWA PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PERTAMA REPUBLIK INDONESIA

Untuk Kelas XI Semester 2 SMA/ MA

Nama :

No/ Kelas :

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Lembar Kerja Peserta Didik Digital (LKPD-D) pada materi “Pembentukan Pemerintahan Pertama Republik Indonesia” Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 2.

Lembar Kerja Peserta Didik Digital (LKPD-D) dilengkapi dengan refleksi kegiatan pembelajaran sebagai wujud penanaman karakter pada diri peserta didik. Selain itu, Lembar Kerja Peserta Didik Digital (LKPD-D) ini diharapkan dapat mengajak siswa untuk lebih kritis sehingga prestasi belajarnya dapat meingkat.

Dalam penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik Digital (LKPD-D) ini penyusun menyadari terdapat banyak kesalahan, maka dari itu penyusun menerima kritik/saran yang dapat membangun sehingga dapat melengkapi Lembar Kerja Peserta Didik Digital (LKPD-D). Akhir kata penyusun mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Yogyakarta, April 2021  
Penyusun

Regina Cynthia

## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Petunjuk Penggunaan**

**Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar**

**Materi**

**A. Latar Belakang Pembentukan**

**Pemerintahan Pertama RI**

**B. Pengesahan UUD dan pemilihan**

**Presiden dan Wakil Presiden**

**C. Pembentukan departemen dan  
pemerintahan daerah**

**D. Pembentukan Badan-Badan Negara**

**E. Pembentukan Kabinet**

**Evaluasi**

**Penilaian Sikap**

**Daftar Pustaka**



## PETUNJUK PENGGUNAAN



1. Isilah terlebih dahulu identitas anda.
2. Lembar Kerja Peserta Didik Digital (LKPD-D) ini disusun bagi peserta didik SMA Kelas XI Semester 2.
3. Bacalah dan pahami materi yang telah disediakan ! Apabila ada materi yang kurang jelas tanyakanlah pada guru.
4. Setiap peserta didik mengerjakan soal pilihan ganda dan esai dengan mengirimkan jawabannya pada email [cynhtiachrishanregina@gmail.com](mailto:cynhtiachrishanregina@gmail.com).
5. Peserta didik membentuk kelompok untuk penugasan membuat infografis dan dikumpulkan pada google form yang disediakan.
6. Setiap peserta didik wajib mengisi kuisioner yang tersedia di Lembar Kerja Peserta Didik Digital (LKPD-D) ini.
7. Selamat mengerjakan dan tetap semangat



## KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
<b>KI 3</b> : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	<b>3.8</b> Menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini.
<b>KI 4</b> : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.	<b>4.8</b> Menalar peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah.

**LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK DIGITAL (LKPD-D)  
PERISTIWA PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PERTAMA RI**

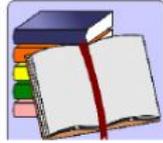
---

**Indikator Pencapaian Kumulatif (IPK)**

- 3.8.1 Menjelaskan latar belakang pembentukan pemerintahan pertama RI.
- 3.8.2 Menjelaskan pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden.
- 3.8.3 Menguraikan secara ringkas pembentukan departemen dan pemerintahan daerah.
- 3.8.4 Menganalisis pembentukan badan-badan negara dan pembentukan kabinet
- 3.8.5 Menganalisis pembentukan berbagai partai politik.
- 3.8.6 Menjelaskan komite van aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan.
- 3.8.7 Menganalisis lahirnya tentara nasional Indonesia.
- 3.8.8 Menghubungkan makna pembentukan pertama Republik Indonesia bagi kehidupan Indonesia saat ini

**Tujuan Pembelajaran**

1. Peserta didik dapat menjelaskan latar belakang pembentukan pemerintahan pertama ri.
2. Peserta didik dapat menjelaskan pengesahan uud 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden.
3. Peserta didik dapat menguraikan secara ringkas pembentukan departemen dan pemerintahan daerah.
4. Peserta didik dapat menganalisis pembentukan badan-badan negara dan pembentukan kabinet
5. Peserta didik dapat menganalisis pembentukan berbagai partai politik.
6. Peserta didik dapat menjelaskan komite van aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan.
7. Peserta didik dapat menganalisis lahirnya tentara nasional Indonesia.
8. Peserta didik dapat menghubungkan makna pembentukan pertama republik indonesia bagi kehidupan indonesia saat ini



## MATERI

### A. Latar Belakang Pembentukan Pemerintahan Pertama RI



Pada saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Mengapa demikian? Karena syarat kelengkapan negara pada saat itu belum semua terpenuhi. Apa saja syarat berdirinya negara? Selain memiliki wilayah, negara harus memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, dan memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain.

### B. Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan pengesahan UUD (Undang-Undang Dasar), yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejambon (sekarang dikenal sebagai gedung Pancasila). Sekitar pukul 11.30,

## **LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK DIGITAL (LKPD-D) PERISTIWA PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PERTAMA RI**

---

sidang pleno dibuka Sejarah Indonesia 97 Sebelum konsep itu disahkan, atas prakarsa Moh. Hatta, berdasarkan pesan dari tokoh Kristen dari Indonesia bagian Timur, sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan itu telah dikonsultasikan Hatta kepada pemuka Islam seperti, Ki Bagoes Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Moh. Hasan. Pertimbangan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian yang terbesar. Berdasarkan rumusan tersebut, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Serta perubahan kecil pada istilah dan strukturnya. di bawah pimpinan Sukarno.

Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum, yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu pasal 3 dari Aturan Peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandardinata, maka secara aklamasi terpilih Ir. Sukarno sebagai Presiden RI, dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk sembilan orang anggota PPKI sebagai Panitia Kecil dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia

### **C. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan daerah**

Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto

## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK DIGITAL (LKPD-D) PERISTIWA PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PERTAMA RI

---

Iskandarinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Sukarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai Panitia Kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya). Otto Iskandarinata menyampaikan hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi delapan provinsi, yaitu sebagai berikut.

- a. Jawa Tengah
- b. Jawa Timur
- c. Borneo (Kalimantan)
- d. Sulawesi
- e. Maluku
- f. Sunda Kecil
- g. Sumatra

Di samping delapan wilayah tersebut, masih ditambah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo, mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut.

- a. Kementerian Dalam Negeri
- b. Kementerian Luar Negeri
- c. Kementerian Kehakiman
- d. Kementerian Keuangan
- e. Kementerian Kemakmuran
- f. Kementerian Kesehatan
- g. Kementerian Pengajaran
- h. Kementerian Sosial
- i. Kementerian Pertahanan
- j. Kementerian Penerangan
- k. Kementerian Perhubungan
- l. Kementerian Pekerjaan Umum